

ISSN : 1410 2188



ETIKA ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI PONDASI NEGARA YANG KUAT

**Kumpulan Makalah Simposium Nasional II
Program Pascasarjana (PPs) Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI)
Bekerja sama dengan
Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASiAN)**



**PPS UNISRI Surakarta bekerja sama dengan ASiAN
Surakarta, Februari 2012**

ANALISIS DIMENSI SPIRITUALITAS MANUSIA TERHADAP PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD POLICY

Oleh : Dr. Bambang Istianto, M.Si *

Abstraksi

Administrasi negara secara umum dipahami sebagai lembaga yang melaksanakan kebijakan negara. Adapun kebijakan sebagai siklus meliputi: perumusan (formulation), pelaksanaan (implementation) dan evaluasi (evaluation). Suatu kebijakan berhasil dengan sempurna (good policy) jika mampu memenuhi kepentingan publik dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Peran sentral manusia dalam perspektif pelaksanaan kebijakan publik yaitu yang berperan sebagai policy maker dan pelaksana operasional kebijakan. Melakukan analisis manusia terkait dengan dimensi spiritualitas yang terdiri dari "qolbu, ratio, hawa nafsu dan perasaan". Pada hakekatnya mekanisme kerja keempat dimensi spiritualistik adalah saling mempengaruhi dan saling tarik menarik yang masing masing saling mendominasi mengikuti dinamika stabilitas kejiwaannya. Dalam perspektif penyelenggaraan administrasi negara, posisi ratio bersifat netral; jika ratio dikendalikan oleh qolbu, sikap dan perilaku serta tindakan manusia akan lurus dan benar, menghasilkan sikap dan tindakan SDM aparatur yang memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi serta professional, maka dianalogikan sebagai seorang administrator yang "negarawan". Jika ratio dikendalikan oleh hawa nafsu menghasilkan sikap dan perilaku manusia cenderung ambisius, avonturir dan frustrasi, maka dianalogikan sebagai seorang administrator yang "politisi". Jika ratio dikendalikan oleh "perasaan" maka sikap dan tindakan serta perilaku cenderung lemah. Akan tetapi jika ratio menjadi sumber kendali maka sikap dan perilaku serta tindakan cenderung ateis, sekuler dan nihilis. Oleh sebab itu jika seorang "politisi" dalam pemilu terpilih menjadi administrator atau pejabat publik maka merupakan konsekuensi logis harus berubah menjadi "negarawan". Dengan demikian apabila seluruh administrator yang menduduki jabatan publik adalah seorang negarawan maka niscaya kebijakan yang lahir akan baik (good policy). Demikian pula sebaliknya jika administrator yang menduduki jabatan publik masih belum meninggalkan performance sebagai politisi, maka akan melahirkan kebijakan yang buruk (bad policy).

Latar Belakang

Dalam masa perjalanan era reformasi di Indonesia semakin lama semakin banyak penilaian berbagai kalangan di masyarakat menunjukkan trend yang semakin negatif terutama terkait dengan penyelenggaraan administrasi negara pada khususnya di birokrasi pemerintahan. Sorotan masyarakat yang paling kritis yaitu antara lain terhadap perilaku aparatur birokrasi yang koruptif masih berlangsung, penegakan hukum yang masih lemah, pelayanan publik yang belum memuaskan masyarakat, kepemimpinan pemerintahan yang menunjukkan fenomena semakin jauh dengan rakyatnya, kewibawaan pemerintah yang terus menurun atau kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun, tindakan pemerintah yang represif terhadap rakyat terutama oleh aparat keamanan semakin massif.

Fenomena yang disebutkan di atas memberikan catatan tersendiri bagi masyarakat bahwa arah dan tujuan reformasi semakin tidak jelas dan kabur, bahkan jangan disalahkan jika sebagian masyarakat mulai membandingkan keadaan saat ini lebih buruk dibandingkan pada masa era Orde Baru. Walaupun sesungguhnya kerusakan penyelenggaraan administrasi negara pada masa Orde Baru sudah mulai berlangsung baik tindakan aparat yang koruptif, penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, tindakan aparat keamanan yang represif, supremasi hukum yang berada di tangan kekuasaan, dan lain lain. Oleh karena pendekatan keamanan yang lebih diutamakan, sehingga segala bentuk tindakan yang melanggar hukum tersebut tidak terekspose secara terbuka di media massa dan terbungkus rapih dalam genggam kekuasaan. Ibarat sebuah rumah yang kemasukan pencuri tetapi penghuninya terlelap tidur. Ketika penyelenggaraan pemerintahan era Orde Baru diterpa krisis moneter pada tahun 1997, maka merupakan konsekwensi logis bangunan ekonomi yang rapuh dan moralitas yang buruk para penyelenggara negara, menimbulkan krisis multi dimensi, pada akhirnya kekuasaan "orde baru" runtuh dan situasi serta kondisi memaksa Presiden Suharto berhenti menjadi presiden yang selama 32 tahun digenggamnya. Catatan yang menarik dari krisis multi dimensi yang sampai saat ini masih dirasakan adalah "krisis moral". Bahkan berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa "krisis moral" telah terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat luas akan tetapi juga terjadi di lingkungan para "penyelenggara negara" baik di lingkungan "eksekutif, legislatif dan bahkan yudikatif". Kerusakan moralitas terutama yang menyangkut tindakan dan perilaku koruptif para penyelenggara negara tersebut sampai saat ini terbilang semakin massif. Misalnya di lembaga "eksekutif" yang sering terekspose adalah "tertangkapnya" para pejabat tinggi setingkat eselon satu atau dua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai dari kasus yang terbaru tahun 2011 yaitu "kasus Wisma Atlit", kasus gratifikasi dua milyar di Kemenakertrans, kasus gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang dan lain lain. Kemudian di lingkungan lembaga Legislatif yaitu; kasus cek melawat pemilihan Gubernur Bank Indonesia yang melibatkan disamping para anggota dewan hampir di semua partai politik juga melibatkan istri seorang mantan pejabat tinggi negara. Selanjutnya kasus yang terjadi di lingkungan Yudikatif ketika beberapa hakim tertangkap tangan oleh KPK dan aparat penegak hukum yaitu oknum Jaksa Urip dan Cyrus Sinaga yang kasusnya cukup fenomenal.

Berdasarkan penjelasan beberapa fenomena yang terkait dengan krisis moral yang terjadi hampir di semua lapisan masyarakat maka pada kesempatan ini penulis mencoba membuka "kotak pandora" dibalik fenomena kejadian yang membuat sebagian besar masyarakat memiliki sikap skeptis apakah kerusakan yang terjadi di negara tercinta ini mampu teratasi dengan tanpa menimbulkan beban masyarakat yang lebih besar sebagaimana peristiwa tragedi politik baik pada tahun 1965 maupun peristiwa politik tahun 1998. Permasalahan yang ingin diungkapkan yaitu faktor "manusia" yang akan menjadi isu sentral dalam kajian topik ini. Dalam ilmu manajemen terdapat adigium yang sangat populer mengatakan bahwa "the men begun the gun" dan the "right men on the right place". Kedua preposisi tersebut menempatkan "manusia" sebagai tema sentral dalam setiap aktifitas kehidupannya. Semua kalangan niscaya memastikan bahwa "faktor manusia" sangat strategis dan menentukan. Akan tetapi faktor mana yang akan dikaji, pada hakekatnya obyek manusia dari berbagai aspek telah banyak dikaji melalui berbagai disiplin ilmu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini akan dikaji secara mendalam yang mungkin luput dari

perhatian dan kemungkinan juga kurang confidence para ilmuwan yang mengkaji sesuatu yang bersifat transcendental atau supernatural yang dianggap wilayah abstrak yaitu dimensi spiritualistik manusia. Sedangkan anjuran metodologi dalam ilmu pengetahuan adalah obyektif rasional yang dibuktikan secara empiristik. Walaupun koridor keilmuan memfatsunkan sebagaimana disebutkan di atas, namun dalam makalah ini mencoba menawarkan kajian yang melatarbelakangi sikap dan tindakan manusia sebagai "administrator" dari aspek mekanisme kerja spiritualistik yang terdiri dari "rasio atau akal, qolbu, hawa nafsu dan perasaan". Relasi dan interaksi keempat instrumen dimensi spiritualistik manusia tersebut pada hakekatnya saling tarik menarik dan saling mendominasi yang dipengaruhi oleh kondisi stabilitas kejiwaan seseorang tersebut. Hasil pertarungan keempat instrumen tersebut sangat menentukan sikap dan perilaku serta tindakan seseorang sebagaimana telah diuraikan dalam abstraksi diatas.

2. Pengertian Administrasi Negara

Pada hakekatnya adminitrasi sebagai ilmu memiliki elemen atau unsur yang merupakan serangkaian proses kegiatan yang berkaitan sehingga membentuk kerangka kesisteman. Untuk melengkapi pembahasan tentang konsep dan teori administrasi negara atau administrasi publik, pada makalah ini akan diuraikan kaidah keilmuan yang terkait penjelasan ilmu induknya yaitu ilmu administrasi. Penjelasan tersebut dimaksudkan agar tetap pada landasan dan pandangan yang bersifat filosofis dan juga komprehensif.

Administrasi adalah ilmu yang mempelajari fenomena "proses kerjasama sekelompok orang", dalam mencapai tujuan bersama. Landasan filosofi ini oleh para pakar dikembangkan menjadi cabang-cabang ilmu yang mampu berdiri sendiri. Seperti misalnya "ilmu organisasi, manajemen, leadership, komunikasi dan human relation". Oleh karena itu jika ilmu administrasi sebagai suatu sistem atau sebuah kesisteman, maka cabang-cabang ilmu tersebut tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi dan bergantung serta membentuk kesatuan totalitas sebagai sistem administrasi.

Apabila diuraikan secara sistimatis dengan tata urutan mulai dari ilmu organisasi, maka ilmu organisasi adalah mempelajari fenomena dari sekelompok orang yang melakukan kerjasama, kemudian dilanjutkan dengan proses pembagian tugas siapa mengerjakan apa serta siapa yang menjadi pimpinan dan bawahan. Fenomena tersebut merupakan proses yang dikatakan sebagai pengorganisasian. Karena didalam organisasi tersebut juga terdapat interaksi antar orang dalam kelompok, maka organisasi juga dapat dikatakan sebagai "sistem kesatuan unit sosial yang kompleks". Sedangkan ilmu manajemen adalah ilmu yang mempelajari fenomena dari proses kerjasama sekelompok orang tersebut, namun dalam melakukan kegiatan memiliki sumber sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya material yang terbatas. Peran manajemen adalah mengelola dan mengurus sumber sumber daya yang terbatas tersebut, dengan menggerakkan orang lain, secara rasional guna mencapai tujuan yang efisien dan efektif melalui fungsi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Demikian pula berkembangnya ilmu leadership atau kepemimpinan, merupakan fenomena dalam proses kerjasama tersebut. seseorang mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk melakukan kegiatan dalam tujuan bersama sesuai dengan yang ditetapkan. Perkembangan ilmu selanjutnya yaitu "komunikasi", yakni merupakan fenomena kemampuan seseorang dalam menyampaikan sesuatu pesan atau dalam bentuk perintah bisa diterima dengan utuh sesuai dengan isi pesan tersebut kepada orang lain. Sehingga seorang pemimpin cenderung mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik, karena seiring dengan kemampuan mempengaruhi orang lain tersebut. Demikian pula seorang pemimpin yang komunikatif akan seiring pula dengan kemampuan melakukan pendekatan atau hubungan dengan orang lain secara baik. Fenomena tersebut dalam perkembangan ilmu administrasi disebut "human relation".

Dengan demikian jika memandang administrasi sebagai sistem dan sedangkan fokus kajian administrasi adalah "proses kerjasama sekelompok orang", maka titik sentral dalam proses kegiatan sistem administrasi adalah terletak pada manusianya. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan dalam kegiatan administrasi tersebut sangat bergantung dan dipengaruhi oleh karakter dan perilaku manusianya, yang mengendalikan kegiatan dalam proses kerjasama tersebut. Demikian pula dalam "manajemen keberhasilan dalam merencanakan, mengorganisir, menggerakkan dan mengontrol proses kerjasama dalam mengelola sumber sumber daya yang terbatas secara rasional, efisien dan efektif tersebut, sangat tergantung pada faktor manusianya. Bahkan oleh karena faktor kunci ada pada "manusia" dalam istilah manajemen sering dikatakan "the man behind the gun". Artinya senjata itu akan dipergunakan untuk "kejahatan" atau "kebaikan" tergantung dari sifat manusianya. Dalam konteks negara ketika fungsi negara menjalankan mandatnya untuk mengurus kepentingan warga negaranya maka agar supaya penyelenggaraan urusan urusan yang dibutuhkan warga negara untuk mencapai kesejahteraan hidupnya misalnya mengenai "sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, keadilan dan lain lain, dapat dicapai secara efisien dan efektif maka digunakanlah "ilmu administrasi". Oleh sebab itu administrasi negara secara sederhana dapat dijelaskan bahwa administrasi yang digunakan untuk penyelenggaraan kekuasaan negara terutama kekuasaan "eksekutif". Jika negara memiliki tiga kekuasaan maka dua kekuasaan yang lain yaitu "legislatif", termasuk wilayah kajian ilmu politik atau juga ilmu negara. Sedangkan kekuasaan yang ketiga yaitu "yudikatif", termasuk dalam wilayah kajian ilmu hukum. Akan tetapi dalam konteks empiristik dan defacto jika peran ketiga lembaga kekuasaan lemah, maka para pakar sering menempatkan kekuasaan atau pemerintahan yang keempat yaitu "media massa" atau disebut "fourth government". Artinya bahwa fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan lebih efektif diperankan oleh media massa ketimbang lembaga kekuasaan resmi. Hubungan ketiga kekuasaan dalam perspektif teori trias politika ketiganya memiliki kedudukan yang sama dan setara. Terdapat dua model dalam sistem pemerintahan yaitu "parlementer dan presidensiil". Pemerintahan Indonesia termasuk menganut faham sistem Presidensiil, walaupun pada kenyataannya sering dijumpai legeslatif melakukan manuver politik dengan menekan (preasure) eksekutif terutama yang menyangkut "penetapan anggaran". Oleh sebab itu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan apakah dengan bentuk parlementer atau presidensiil menjadi sangat menentukan terhadap kinerja administrasi negara. Artinya jika saat ini dengan sistem presidensiil mampu mendukung stabilitas pemerintahan eksekutif dalam melaksanakan setiap kebijakan dalam rangka mencapai tujuan

negara maka pada gilirannya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik juga akan tercapai sesuai dengan yang menjadi ekspektasi masyarakat luas. Dengan demikian kinerja administrasi negara tersebut dapat dipastikan tidak terlepas dari dukungan para administrator yang profesional dan kompeten. Unsur "manusia" yang berada dibelakang kesuksesan kinerja administrasi negara tetap menjadi kunci sukses tersebut sehingga relevansi kajian dimensi spiritualistik manusia diharapkan dapat diterima secara logika dan tetap dalam koridor akedemis.

3.

Dimensi Spiritualistik Manusia

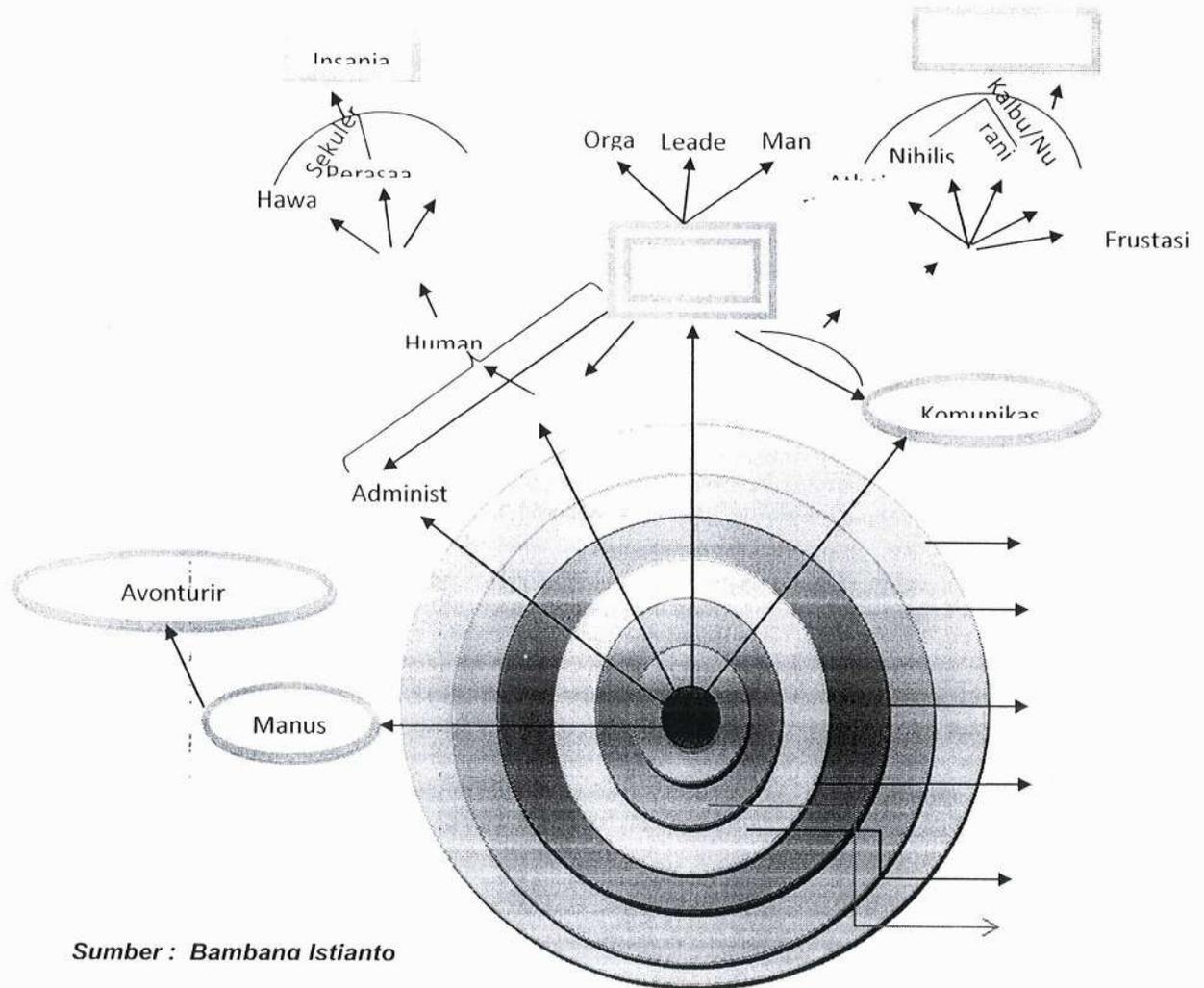
Pada jati diri manusia pada hakekatnya Tuhan memberikan kelengkapan hidup manusia yang disebut "panca indra" yang terdiri : mata, telinga, hidung dan mulut. Sedangkan panca indra yang paling pokok yaitu yang selama ini disebut dimensi "spiritualistik yang terdiri dari : "qalbu atau hati nurani, ratio, perasaan dan hawa nafsu". Posisi "ratio" bersifat netral, artinya arah bandul pada diri seseorang itu condong ke "qalbu", perasaan dan hawa nafsu tergantung kedekatan manusia dengan Tuhannya. Artinya jika manusia dekat dengan Tuhan atau memiliki "keyakinan dan keimanan" terhadap Tuhan, kecenderungan "ratio" akan dikendalikan oleh "qalbu", akan tetapi kalau sebaliknya, maka "ratio" lebih cenderung dikendalikan oleh "hawa nafsu atau mungkin perasaan". Dalam kondisi yang lebih ekstrim sangat mungkin terjadi pada diri manusia yang sangat mengagungkan "ratio", maka bandul itu akan bergerak ke atas yakni manusia akan cenderung menjadi "Atheis, sekuler atau nihilis". Atheis artinya menentang terhadap kebenaran yang datang dari Tuhan melalui ajaran agama, sedangkan "sekuler" artinya memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan dunia, adapun "nihilis" pemikiran yang ingin meniadakan "keberadaan Tuhan". Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari hari manusia akan menghadapi pergolakan diantara keempat instrumen tersebut atau dengan kata lain konstelasi keempat instrumen tersebut sangat dinamis tarik menarik dalam menggerakkan panca indra manusia. Apakah mata, telinga, hidung, mulut, akan dipergunakan untuk "kebaikan" atau "keburukan" sangat dipengaruhi oleh hasil dari pergulatan keempat instrumen yang cenderung saling mendominasi.

Oleh sebab itu dalam analisis dimensi spiritualistik manusia akan dikaitkan dengan sejauhmana perilaku dan tindakan para administrator dalam perspektif pembuatan (formulasi) dan pelaksanaan (implementation) dan evaluasi (evaluation) kebijakan. Jika rasio atau akal dikendalikan oleh "qalbu" dimiliki oleh para administrator maka dalam perspektif penyelenggaraan negara akan menghasilkan "good policy formulation dan good policy implementation". Sedangkan jika ratio atau akal dikendalikan oleh "hawa nafsu" dimiliki oleh para administrator maka dalam perspektif penyelenggaraan negara akan menghasilkan "bad policy formulation dan bad policy implementation". Kemudian jika "ratio" atau akal dikendalikan oleh "perasaan" dimiliki oleh para administrator, akan menghasilkan "lemahnya" pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Adapun jika ratio atau akal terlalu di agungkan atau di dewakan oleh para administrator maka akan menghasilkan formulasi kebijakan yang konten atau isinya cenderung bersifat sekuler.

4. Hubungan Administrasi Sebagai Sistem Dengan Dimensi Spiritualistik Manusia

Jika administrasi sebagai sistem diilustrasikan dalam bentuk gambar lingkaran besar yang didalamnya secara berlapis masing-masing yaitu : administrasi, organisasi, manajemen, leadership, komunikasi dan human relation, maka titik tengah yang paling dalam sebagai titik sentral yaitu "manusia" merupakan konstelasi pergulatan antara "kalbu, ratio, hawa nafsu dan perasaan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini;

Gambar 1: Paradigma Administrasi dalam kesistem Ambisius



Sumber : Bambang Istianto

a

Berdasarkan pada gambar di atas, jika administrasi dipandang dari sudut kesisteman yang menjalankan fungsi pengurusan, pengelolaan dan pengaturan kekuasaan negara, maka disebut sebagai "sistem administrasi negara". Keterkaitan dengan sub sistem yang lain tidak terpisahkan sehingga keberhasilan suatu sistem tergantung seberapa kuat dukungan yang seimbang dari sub sistem yang lainnya. Namun demikian kekuatan sistem pada akhirnya membutuhkan energi yang positif dari sub sistem manusiannya. Dalam gambar 2 diatas sub sistem manusia tetap diletakkan sebagai fungsi pengendali terhadap proses bekerja sistem tersebut. Oleh karena itu sikap dan perilaku serta tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh konstelasi masing-masing instrumen yang dimiliki yaitu antara : "hati nurani", "ratio", "hawa nafsu" dan "perasaan". Keempat instrumen tersebut saling tarik menarik, namun masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti misalnya kecenderungan hati nurani menuju pada tarikan "kebenaran", sedangkan "ratio" cenderung bersifat "netral", adapun "hawa nafsu" cenderung bersifat "kesenangan atau hedonis", dan "perasaan" cenderung kepada hal yang bersifat "sedih atau gemibira".

Oleh karena itu apabila Gambar 2 di atas menjadi instrumen analisis terhadap fenomena dalam penyelenggaraan negara, maka berbagai peristiwa tragis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang diakibatkan oleh "kebijakan negara", yang berdampak pada "kebaikan" atau kerusakan bagi masyarakat", maka faktor "manusia" yang berada dibalik skenario pembuatan "kebijakan negara", menjadi faktor kunci. Jika suatu kebijakan negara atau pemerintah bermanfaat untuk manusia maka masyarakat akan merasa : "damai, aman, sejahtera dalam kehidupan masyarakat (good policy), akan tetapi jika kebijakan tersebut berdampak buruk terhadap masyarakat, maka akan menyengsarakan kehidupan masyarakat (bad policy).

Pada hakekatnya suatu kebijakan publik dibuat semata mata untuk kepentingan masyarakat luas yang sifatnya menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu pembuatan kebijakan selalu berdasarkan motif yang baik yaitu berorientasi terhadap problem solving, bukan malahan membuat permasalahan baru yang terkadang bertambah kompleks. Dengan demikian kebijakan publik yang telah ditetapkan memiliki standar optimum, oleh karena orientasi dan motif pembuatan seperti yang diutarakan diatas. Untuk itu pembuatan kebijakan (policy formulation) akan mencerminkan pergulatan berbagai kepentingan baik dalam proses artikulasi maupun agregasi kepentingan, sehingga integritas para policy maker menjadi jaminan terhadap kualitas sebuah kebijakan itu ditetapkan. Ketika standar kebijakan yang harus dihasilkan oleh para policy maker memiliki kualitas optimum, artinya kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang dasar dan falsafah negara dan bangsa, memang dibutuhkan dimensi spiritualistik manusia yang lebih dikendalikan oleh "Qolbu" , maka dalam konteks penyelenggaraan administrasi negara yaitu seorang "administrator yang negarawan". Demikian pula sebaliknya jika suatu kebijakan yang ditetapkan tidak dapat menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah, maka dapat diduga dalam proses pembuatan kebijakan para administrator lebih cenderung rasio atau akal dikendalikan oleh "hawa nafsu" atau mereka adalah para administrator yang masih memiliki "performance politisi".

Sebagaimana telah disebutkan bahwa mulai dari perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan keterlibatan para policy maker dan pelaksana operasional kebijakan merupakan kunci sukses dari suatu kebijakan tersebut. Oleh sebab itu relevansi kajian terhadap relasi antara dimensi spiritualistik manusia sebagai penggerak, pendorong dan pengendali sikap dan perilaku serta tindakan para pejabat publik sebagai "administrator" pelaksana kebijakan mampu atau tidak menjalankan misi tersebut. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang lebih spesifik mengungkap latarbelakang yang dominan pada diri manusia ketika menjatuhkan pilihan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan. Untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut baik atau buruk merupakan keniscayaan dari refleksi hasil kerja dinamika dimensi spiritualistik manusia seperti yang sudah dibahas diatas.

Sebagai contoh kebijakan negara atau pemerintah yang menyengsarakan masyarakat yang menyebabkan terjadinya peristiwa ; G 30 S PKI pada masa Orde Lama, peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 yang diikuti dengan runtuhnya rezim Orde Baru, peristiwa pemakzulan terhadap Presiden Gus Dur tahun 2001, dan yang terbaru tahun 2010 yakni kasus Bank Century yang dapat berakibat pemakzulan terhadap Presiden atau menimbulkan hubungan yang kurang harmonis kedua lembaga tersebut. Meskipun hasil akhir keputusan politik dari Pansus Hak Angket Bank Century telah berakhir pada babak baru yang tidak menyebutkan pernyataan "pemakzulan", dan bahkan respon eksekutif pada esensinya menolak keputusan politik dari lembaga legislatif, maka dampak dari keputusan politik tersebut tetap rentan dengan konflik antar kedua lembaga negara belum akan berhenti, jika tidak terkelola dengan baik, hati-hati dan waspada.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pusaran pengelolaan "rationalitas" administrasi negara lebih condong kepada pengelolaan yang dipengaruhi kuat oleh praktek "hawa nafsu dan perasaan", dan jauh dari pengendalian "kalbu atau hati nurani". Karena dampak dari kebijakan tersebut cukup menyengsarakan kehidupan masyarakat, sehingga terjadi tiga jenis krisis yaitu pertama ; menimbulkan krisis politik pada saat terjadinya peristiwa G 30 S PKI, kedua ; krisis ekonomi akibat dari kebijakan moneter yang berujung pada kerusuhan bulan Mei 1998 dan jatuhnya rezim Orba dan ketiga ; krisis moral akibat dari kebijakan BLBI pada masa Orde Baru dan di era reformasi muncul kebijakan Bail out Bank Century, yang diduga terdapat pelanggaran hukum yang dapat dipidanakan, mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dan masyarakat.

Demikian pula jika dalam contoh penyelenggaraan administrasi negara yang lebih condong pada bandul "ratio", meskipun posisi "ratio" bersifat netral, namun jika terlalu kuat penekanan terhadap "ratio", bisa jatuh pada posisi "sangat netral" atau istilah filsafat kehidupan disebut "sekuler". Sedang dalam istilah teologis bisa jatuh pada posisi "ateis" bahkan "nihilis". Sebagai contoh yang cukup relevan yaitu dalam "perumusan atau formulasi kebijakan RUU Nikah Siri" yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama, telah menimbulkan polemik yang bisa berskala besar antara pemerintah dengan masyarakat terutama dari para Ulama, kalangan pesantren dan elemen masyarakat yang lain.

Polemik tersebut timbul karena disatu pihak berlandaskan bahwa "nikah siri" tidak bertentangan dengan "nilai-nilai agama" yang diwakili dari kalangan Ulama dan beberapa pesantren dan pihak lain dari pemerintah berdasarkan pada nilai "rasionalitas" fakta sosial yang cenderung berkiblat pada "sekularisasi" yakni "nikah siri". dinilai merugikan kaum perempuan dan keturunannya serta melanggar administrasi pemerintahan, sehingga pelaku nikah siri harus mendapat sanksi pidana, karena pernikahan siri tidak tercatat pada catatan sipil. Padahal seperti disebutkan di atas "pernikahan siri" adalah sah dan tidak melanggar hukum agama Islam.

Penjelasan terhadap fenomena tersebut secara ringkas dimaksudkan hanya sebagai contoh kasus untuk memberikan diskripsi bahwa dalam penyelenggaraan administrasi negara bisa condong kepada bandul "ratio", kalbu, hawa nafsu atau perasaan, tergantung siapa yang menjadi "ADMINISTRATORNYA". Oleh karena itu jika terpilih "pemimpin" yang memiliki "integritas, loyalitas, moralitas yang kuat serta jiwa NEGARAWAN, niscaya dalam menjalankan roda pemerintahan, mampu menegakkan keadilan dan kebenaran untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu formulasi dan pengambilan kebijakan yang dibuatnya niscaya akan menghasilkan "good policy".

Akan tetapi jika yang terpilih pemimpin yang sebaliknya niscaya akan selalu timbul ketidakstabilan sosial - politik dan ekonomi, dalam hal ini bandul "ratio" lebih cenderung dikendalikan oleh "hawa nafsu", maka hasil formulasi kebijakan dan penetapan kebijakan akan menjadi sebaliknya yaitu "bad policy". Pemimpin atau "Adminisrator" yang lebih cenderung dikendalikan oleh "ratio maupun hawa nafsu" biasanya Administrator yang "POLITISI" yang cenderung memiliki jiwa "ambisius dan avounturir atau frustasi" (AAF).

Demikian pula jika dalam pengelolaan kebijakan negara terlalu cenderung bersifat sangat "rational", niscaya kualitas pembuatan kebijakan (policy making) akan jauh dari nilai-nilai masyarakat, nilai agama, sehingga bandul akan cenderung bergeser pada "sifat sekuler", bahkan bisa lebih dalam lagi yaitu "ateis dan nihillis". seperti yang terjadi dan berkembang di negara maju misalnya di Eropa, Amerika serikat, Inggris dan Jerman dan lain lain.

Untuk selanjutnya pada kesempatan pembahasan tentang ilmu administrasi tersebut, contoh kasus di atas tidak bermaksud untuk dianalisis secara mendalam, karena fokus pembahasan, sesuai dengan sub topik ini yaitu penjelasan mengenai "badan eksekutif" sebagai fokus kajian ilmu administrasi negara. Namun dalam pemikiran yang ingin mengetahui berbagai faktor dimensi filosofis terhadap praktek penyelenggaraan negara, dimana lembaga Eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dan bahkan ikut terlibat secara intensif dalam proses "formulasi kebijakan (policy formulation)", sesungguhnya menjadi kajian yang cukup menarik jika dimensi spritualitas manusia dapat menjadi salah satu variabel kontrol yang ikut dijadikan sebagai unit analisis untuk mengetahui faktor mendasar terhadap suatu kebijakan itu benar (good policy) dan kebijakan itu salah (bad policy). Meskipun para ilmuwan sangat hati-hati dan cenderung menghindari kajian variabel yang bersifat transedental, disamping karena postulat keajegannya yang sulit dihitung untuk mencari kebenaran empiris, akan tetapi juga ada kecenderungan hal tersebut dianggap mengurangi nilai keilmuannya, karena paradigma yang masih dianut adalah

paradigma "kebenaran sebuah ilmu pengetahuan adalah terletak pada bobot pembuktian empiristiknya".

6.

Penutup

Pada bagian penutup dapat dijelaskan bahwa analisis dimensi spiritualistik manusia dalam perspektif penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia patut dikembangkan menjadi kajian dalam ruang lingkup "etika administrasi negara". Sebab pada hakekatnya menyangkut kajian mengenai sikap dan perilaku serta tindakan manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai baik yang bersumber dari agama, falsafah hidup dan etika moral yang berkembang dalam masyarakat. Ketika manusia menjadi seseorang yang memiliki peran dalam masyarakat sebagai "administrator publik" misalnya menjadi "presiden, gubernur, bupati/walikota" atau sebagai pejabat publik dari karier di birokrasi pemerintahan seharusnya merupakan sosok pilihan (selective people) yang memiliki standar nilai dan moral yang tinggi sebagaimana standar nilai dan moral sosok "negarawan" yaitu : jiwa pengabdian, dedikasi, loyalitas, integritas yang tinggi terhadap negara dan bangsanya. Seorang negarawan sudah bisa dipastikan bahwa pada dirinya "qolbu atau hati nurani" niscaya lebih kuat dan dominan menguasai rasio atau akal, sehingga ketika mengambil suatu tindakan atau kebijakan akan lebih berorientasi terhadap kepentingan publik atau masyarakat, negara dan bangsanya. Oleh sebab itu jika negara dan pemerintah dewasa ini dipimpin oleh sosok "negarawan" niscaya carut marut penyelenggaraan pemerintahan tidak akan terjadi misalnya ; penegakan hukum yang lemah, tindakan korupsi yang masih berlangsung secara massif, para pemburu rente (rent seeker) merajalela di tubuh pemerintahan atau bersarang di partai-partai politik, produk undang-undang yang lebih berorientasi kepentingan bisnis ketimbang pro rakyat, kontrak karya terhadap eksplorasi sumber kekayaan alam lebih menguntungkan kaum pemodal, aparat keamanan yang lebih membela kelompok pebisnis ketimbang kepentingan rakyat dengan argumentasi secarik kertas legalitas formal dan lain lain.

Oleh sebab itu perubahan mind set para administrator negara menjadi seorang "negarawan" merupakan keniscayaan kehadirannya dalam situasi dan kondisi negara dan pemerintahan yang lemah akibat dari penerapan manajemen pemerintahan yang cenderung dikendalikan oleh para pebisnis asing maupun domestik.